

BAE V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kembali ke khittah 1926 merupakan titik kulminasi dalam sejarah NU, dimana nilainya barangkali hanya bisa ditandingi dengan semangat kelahirannya dahulu. Sementara kontroversinya jelas tidak tertandingi oleh sejarah NU manapun. Sedemikian rupa, sehingga kontradiksi dalam tubuh organisasi sosial selalu dibangun atas dasar semangat khittah 1926.

Pada reorientasi politik NU, rupanya mempunyai tempat tersendiri di mata para pengamat. Sebagian menilai bahwa NU pasca khittah adalah NU sama sekali tidak berpolitik, sementara sebagian yang lain meyakini bahwa hanya aktifitas politik praktis yang kini ditanggalkannya menuju pada politik kerakyatan yaitu, sebuah upaya transformasi nilai-nilai politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Singkatnya dari pembahasan mengenai pola gerakan politik NU pasca khittah 1926, dalam studi pemikiran tentang nilai-nilai kepolitikan NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapatlah ditarik beberapa uraian singkat guna menyimpulkan secara sederhana sebagai berikut:

1. Keputusan NU untuk mengembalikan program pada *jamiyah diniyah* sebagaimana misi awal berdiri tidak mudah disadari oleh warga *nahdliyyin* dengan bersikap netral terhadap dukungan peserta pemilu. Sejumlah elit politis berusaha keras mempertahankan potensi NU dalam menyuplai suara terhadap Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Selain sejumlah dukungan massa terbesar, warga NU masih bersikap paternalistik dalam menentukan pilihan. Hal ini yang membuat sejumlah politisi NU semisal, Mahbub Djunaedi dengan konsep *Khittah Plus* berhasil menjual suara NU ke Golkar. Sikap Mahbub menjadi tantangan bagi Abdurrahman Wahid untuk selalu bersikap netral terhadap OPP dalam setiap ceramah-cermahnya.
2. Berangkat dari terabaikan dalam memprioritas program kerakyatan sebagaimana misi awal didirikannya, NU berinisiatif untuk mengembalikan organisasi ini menjadi *jamiyah diniyah*. Keputusan kembali ke *khittah* di Situbondo 1984, merupakan langkah awal organisasi ini, menempatkan strategi baru dalam perubahan paradigma wacana melalui reorientasi politik yaitu, meninggalkan keterlibatan penuh pada politik praktis menuju keterlibatan pada kepedulian sosial, ekonomi, politik dan budaya. Bagaimana, NU ikut memikirkan kesadaran masyarakat sebagai warga negara untuk ikut

terlibat melalui mekanisme yang ada.

3. Politik NU didalamnya tersimpan sejumlah ke-khas-an tradisi sebagai tanda utama perjalanan NU dalam politik. Politik dalam rumusan NU yaitu politik yang berintegrasi ketangsaan dengan memegang nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis menuju masyarakat yang di dambakan. Paradigma politik NU pasca khittah '26 adalah gerakan-gerakan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mengacu pada pemberdayaan sumber daya *mandliyin* dan warga masyarakat secara umum.

B. Saran-Saran.

1. Dinamika khittah '26 dalam implementasinya mengandung sejumlah kontroversi kepentingan untuk memanfaatkan massa NU. Golkar merasa berkepentingan untuk memanfaatkan massa NU dalam setiap Pemilu. Dengan demikian, NU melalui keputusan kembali ke khittah 1926 dengan berwarna-warni kepentingan merasa wajar dari sebuah perjalanan proses menjadi. Hal ini sebagai pelajaran sekaligus sebuah referensi konflik dalam kehidupan sosio religio-politik--ketika perubahan paradigma gerakan menjadi keharusan dengan realitas penuh heterogen.

2. Pembahasan pola gerakan politik NU pasca khittah dalam studi pemikiran merupakan upaya pengkajian nilai-nilai kepolitikan NU dalam mewujudkan kemerdekaan dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, generasi muda yang gandrung akan perpolitikan Indodesia, NU sebagai salah satu elemen vital kepolitikan Indonesia, tidak serta merta diabaikan dalam kontribusinya. NU secara gigih mencoba menjaga jarak bersama negara dengan melibatkan diri dalam gerakan-gerakan sosial, ekonomi, budaya sebagai strategi pilihannya, ketika sejumlah organisasi sosial keagamaan terkooptasi oleh negara.
3. Gerakan-gerakan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang diambil NU perlu mendapat perhatian bagi kalangan muda untuk lebih memahami bahwa, ketika negara menjadi hegemonik, saat bersamaan warga masyarakat mendapat porsi untuk diberdayakan. Dengan terlibat dalam persoalan-persoalan kerakyatan, tanpa sengaja ikut memberikan sebuah makna akan arti dinamika bangsa termasuk, bagaimana membangun kesadaran masyarakat sebagai warga negara ikut memikirkan hak-hak minoritas, keadilan sosial ekonomi dan sebagainya.

C. Fenatup

Demikianlah, akhir sebuah deskripsi penulisan skripsi ini dengan studi pemikiran model atau pola gerakan politik NU setelah kembali ke khittah 1926. Penulis berinisiatif mengkaji bentuk gerakan politik NU pasca khittah 1926 didalamnya tersimpan sejumlah ciri khas NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, hal ini semua tidak bisa dikatakan jauh dari kekurangan di sana sini baik secara teori-teori sosial politik sebagai rasional kritisnya maupun sejumlah data-data literer NU sebagai acuan pembahasannya.

Maka tanpa mengurangi keseriusan, penulis mengundang sejumlah kritik membangun dari seantreo pembaca budiman demi kesempurnaan karya ini.

Wassalam.